

PENGUATAN DEMOKRASI MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT: PELATIHAN ADVOKASI DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK

Normawati¹, Jusuf Madubun²

¹Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura
e-mail: normawatifisip2@gmail.com¹, jmadubunwr3unpatti@gmail.com²

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi adalah fondasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Namun, di Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah akibat kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam advokasi dan penyusunan kebijakan publik. Untuk mengatasi masalah ini, diadakan pelatihan "Penguatan Demokrasi Melalui Partisipasi Masyarakat: Pelatihan Advokasi dan Penyusunan Kebijakan Publik" pada tanggal 14 Maret 2024 melalui aplikasi Zoom, yang diikuti oleh 29 peserta dari berbagai kalangan. Metode pelatihan meliputi penyampaian materi teoretis, studi kasus, lokakarya praktis, simulasi, diskusi kelompok, dan evaluasi. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta, serta terbentuknya jaringan kolaborasi yang kuat. Peserta mampu menyusun rencana advokasi dan policy brief yang efektif. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa pelatihan berhasil memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk advokasi yang efektif. Hal ini penting untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil.

Kata kunci: Demokrasi, Advokasi, Partisipasi Masyarakat

Abstract

Community participation in the democratic process is a fundamental foundation for creating a transparent, accountable, and responsive government. However, in Indonesia, the level of public participation remains low due to a lack of understanding and skills in advocacy and public policy-making. To address this issue, a training session titled "Strengthening Democracy Through Community Participation: Advocacy and Public Policy Training" was held on March 14, 2024, via Zoom, involving 29 participants from various backgrounds. The training methods included theoretical presentations, case studies, practical workshops, simulations, group discussions, and evaluations. The training results showed significant improvements in participants' knowledge and skills, as well as the formation of strong collaborative networks. Participants were able to develop effective advocacy plans and policy briefs. The conclusion of this activity is that the training successfully enhanced community participation in the democratic process by providing the necessary knowledge and skills for effective advocacy. This is crucial for creating more inclusive and equitable public policies.

Keywords: Democracy, Advocacy, Community Participation

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Namun, kenyataannya, tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik dan advokasi sering kali masih rendah, terutama di Indonesia (Sepyah et al., 2022). Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kondisi ini meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme partisipasi, keterbatasan akses informasi, dan kurangnya kemampuan dalam menyusun serta mengadvokasi kebijakan yang efektif (Nindatu, 2019).

Masalah rendahnya partisipasi ini menimbulkan berbagai isu terkait, seperti kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, serta terbatasnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik (Maftuchan et al., 2021). Kondisi ini menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat, mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokratis (Wathoni, 2018). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya melalui pelatihan advokasi dan penyusunan kebijakan publik.

Pelatihan advokasi dan penyusunan kebijakan publik bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan publik (Sitorus, 2023). Dengan memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi dan tata kelola yang baik, serta teknik-teknik advokasi yang efektif, masyarakat diharapkan mampu menyuarakan kepentingan mereka dengan lebih baik, mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dan berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan (Hermawan & Khikmawanto, 2023).

Isu-isu terkait lainnya termasuk minimnya kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi masalah-masalah publik secara kritis, serta kurangnya jaringan dan dukungan yang memadai untuk melakukan advokasi (Makhya et al., 2022). Pelatihan ini juga bertujuan untuk membangun jaringan antar peserta dari berbagai kalangan, sehingga tercipta sinergi dan kolaborasi dalam upaya advokasi dan penyusunan kebijakan publik. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga untuk memperkuat komunitas dan membangun kohesi sosial yang lebih baik.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi juga menghadapi tantangan baru, seperti disinformasi dan polarisasi opini (Riyanto & Kovalenko, 2023). Oleh karena itu, pelatihan ini juga akan membahas strategi untuk mengatasi tantangan tersebut, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya penguatan demokrasi melalui partisipasi masyarakat yang lebih aktif, informatif, dan konstruktif.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024 melalui aplikasi Zoom, dengan melibatkan 29 peserta dari berbagai kalangan. Melalui format daring ini, diharapkan dapat menjangkau lebih banyak partisipan dari berbagai wilayah, serta memfasilitasi partisipasi yang lebih fleksibel dan inklusif. Dengan partisipasi yang beragam, diharapkan tercipta diskusi yang kaya dan komprehensif, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Penguatan Demokrasi Melalui Partisipasi Masyarakat: Pelatihan Advokasi dan Penyusunan Kebijakan Publik" akan dilaksanakan melalui serangkaian metode yang terstruktur dan komprehensif. Metode ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya menerima informasi tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi. Berikut adalah metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini:

1. **Pendahuluan dan Orientasi** Pada awal kegiatan, akan dilakukan sesi pendahuluan dan orientasi untuk memperkenalkan tujuan, agenda, dan struktur pelatihan kepada seluruh peserta. Sesi ini juga akan digunakan untuk membangun suasana yang kondusif dan saling mengenal antar peserta. Penggunaan ice-breaking activities akan membantu memecah kekakuan dan memotivasi peserta untuk berpartisipasi aktif sepanjang kegiatan.
2. **Penyampaian Materi Teoretis** Sesi penyampaian materi teoretis akan disampaikan oleh narasumber yang ahli di bidang demokrasi, advokasi, dan kebijakan publik. Materi akan mencakup prinsip-prinsip dasar demokrasi, mekanisme partisipasi publik, teknik-teknik advokasi, dan proses penyusunan kebijakan publik. Materi ini akan disampaikan secara interaktif melalui presentasi visual, diskusi kelompok, dan tanya jawab untuk memastikan pemahaman yang mendalam.
3. **Studi Kasus dan Analisis Peserta** akan diajak untuk menganalisis beberapa studi kasus yang relevan dengan isu-isu demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia. Melalui metode ini, peserta akan belajar bagaimana menerapkan teori yang telah dipelajari dalam konteks nyata, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam advokasi dan penyusunan kebijakan. Studi kasus akan dibahas dalam kelompok kecil untuk mendorong partisipasi aktif dan pemikiran kritis.
4. **Lokakarya Praktis (Workshops)** Untuk memperkuat keterampilan praktis, akan diadakan beberapa lokakarya yang difokuskan pada teknik advokasi dan penyusunan kebijakan publik. Dalam lokakarya ini, peserta akan dilatih untuk mengembangkan rencana advokasi, menulis

policy brief, dan mempresentasikan argumen mereka secara efektif. Lokakarya ini akan dipandu oleh fasilitator berpengalaman yang akan memberikan umpan balik konstruktif kepada peserta.

5. Simulasi dan Role-Playing Salah satu metode yang efektif untuk mengembangkan keterampilan advokasi adalah melalui simulasi dan role-playing. Peserta akan berperan sebagai berbagai pemangku kepentingan dalam sebuah simulasi proses pembuatan kebijakan publik. Metode ini memungkinkan peserta untuk mengalami dinamika negosiasi, membangun koalisi, dan mengelola konflik secara langsung. Simulasi ini dirancang untuk menguatkan pemahaman praktis dan meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam situasi nyata.
6. Diskusi Kelompok dan Refleksi Setelah setiap sesi utama, akan diadakan diskusi kelompok untuk membahas materi yang telah disampaikan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi peserta. Sesi refleksi ini penting untuk memperdalam pemahaman, mengidentifikasi pembelajaran kunci, dan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut. Peserta didorong untuk berbagi pandangan dan umpan balik, sehingga tercipta suasana belajar yang kolaboratif dan saling mendukung.
7. Penugasan dan Evaluasi Di akhir kegiatan, peserta akan diberikan penugasan untuk merancang sebuah rencana advokasi atau policy brief berdasarkan isu yang mereka pilih. Penugasan ini akan dievaluasi oleh fasilitator dan narasumber untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Evaluasi juga akan dilakukan melalui survei kepuasan peserta untuk menilai efektivitas metode pelatihan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan di masa depan.

Dengan metode yang terstruktur ini, diharapkan peserta dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam, keterampilan praktis, dan motivasi yang kuat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan penyusunan kebijakan publik. Pelatihan ini diharapkan mampu menghasilkan agen perubahan yang siap berkontribusi secara aktif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan "Penguatan Demokrasi Melalui Partisipasi Masyarakat: Pelatihan Advokasi dan Penyusunan Kebijakan Publik" yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024 melalui aplikasi Zoom dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang dari berbagai kalangan menghasilkan berbagai capaian yang signifikan. Berikut adalah hasil-hasil utama dari kegiatan ini:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Para peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi, mekanisme partisipasi publik, teknik-teknik advokasi, dan proses penyusunan kebijakan publik. Evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata skor pengetahuan sebesar 40%.
2. Pengembangan Keterampilan Praktis Peserta berhasil mengembangkan keterampilan praktis dalam advokasi dan penyusunan kebijakan publik. Melalui lokakarya dan simulasi, peserta mampu merancang rencana advokasi, menulis policy brief, dan mempresentasikan argumen mereka secara efektif. Keterampilan ini diuji melalui penugasan akhir yang mendapat umpan balik positif dari fasilitator dan narasumber.
3. Jaringan dan Kolaborasi Kegiatan ini berhasil membangun jaringan dan kolaborasi antar peserta yang berasal dari berbagai latar belakang dan wilayah. Diskusi kelompok dan sesi refleksi mendorong terciptanya hubungan yang lebih erat dan saling mendukung di antara peserta. Beberapa peserta melaporkan telah memulai inisiatif kolaboratif baru sebagai hasil dari pelatihan ini.
4. Rencana Advokasi dan Policy Brief Sebagai bagian dari penugasan akhir, setiap peserta berhasil menyusun rencana advokasi atau policy brief berdasarkan isu yang mereka pilih. Rencana dan policy brief ini mencerminkan pemahaman yang baik tentang masalah publik, analisis yang mendalam, dan strategi advokasi yang efektif. Beberapa rencana ini bahkan telah diajukan ke pemangku kepentingan terkait untuk ditindaklanjuti.
5. Umpan Balik dan Kepuasan Peserta Survei kepuasan peserta menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa sangat puas dengan kualitas materi, metode pelatihan, dan fasilitasi. Peserta memberikan skor rata-rata 4.8 dari 5 untuk kepuasan keseluruhan. Umpan balik positif mencakup apresiasi terhadap narasumber yang kompeten, metode interaktif, dan relevansi materi dengan kebutuhan praktis mereka.

6. Identifikasi Isu dan Tantangan Melalui diskusi dan analisis studi kasus, peserta berhasil mengidentifikasi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam proses advokasi dan penyusunan kebijakan publik di Indonesia. Beberapa isu utama yang diangkat meliputi keterbatasan akses informasi, disinformasi, kurangnya transparansi pemerintah, dan tantangan dalam membangun koalisi yang efektif.
7. Rekomendasi Kebijakan Dari hasil diskusi dan penugasan, peserta berhasil merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang konkret untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Rekomendasi ini mencakup usulan untuk meningkatkan akses informasi publik, membangun platform partisipasi digital, mengadakan pelatihan serupa secara berkala, dan memperkuat pendidikan demokrasi di berbagai tingkat.
8. Komitmen Tindak Lanjut Peserta menunjukkan komitmen yang kuat untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kegiatan advokasi mereka di masa depan. Banyak peserta yang menyatakan akan mengimplementasikan rencana advokasi yang telah mereka buat dan terus berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan kebijakan publik di komunitas mereka.

Dengan hasil-hasil ini, kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil mencapai tujuannya untuk memperkuat demokrasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Para peserta kini lebih siap dan termotivasi untuk berperan aktif dalam proses demokrasi dan menjadi agen perubahan di masyarakat mereka.

Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi merupakan fondasi utama yang memastikan keberlanjutan dan kualitas pemerintahan yang demokratis (Cahyono & Mufidayati, 2021). Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang bagaimana warga negara berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Pelatihan "Penguatan Demokrasi Melalui Partisipasi Masyarakat: Pelatihan Advokasi dan Penyusunan Kebijakan Publik" berupaya menjawab tantangan ini dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk terlibat secara efektif dalam proses demokrasi.

Pentingnya partisipasi masyarakat terletak pada kemampuan warga untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka, serta memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat (Mahardhani, 2018). Ketika masyarakat kurang berpartisipasi, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka dan lebih cenderung mencerminkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang lebih kuat (Damanik, 2023). Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Namun, partisipasi masyarakat di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman tentang mekanisme partisipasi dan proses penyusunan kebijakan publik (Sunarto et al., 2021). Banyak warga yang belum memahami bagaimana mereka bisa terlibat dalam proses ini dan merasa bahwa pendapat mereka tidak akan didengar atau diakomodasi oleh pemerintah. Pelatihan ini bertujuan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan memberikan informasi yang jelas dan praktis tentang bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam advokasi dan penyusunan kebijakan.

Selain itu, keterampilan advokasi yang efektif juga sangat penting (Hermanto, 2023). Advokasi yang sukses tidak hanya memerlukan pengetahuan tentang isu tertentu, tetapi juga kemampuan untuk menyusun argumen yang kuat, membangun koalisi, dan mempengaruhi pemangku kepentingan (Bahri et al., 2023). Melalui pelatihan ini, peserta diajarkan berbagai teknik advokasi, seperti menyusun rencana advokasi, menulis policy brief, dan melakukan presentasi yang meyakinkan. Keterampilan ini memungkinkan peserta untuk menyuarakan kepentingan mereka dengan lebih efektif dan strategis.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam era digital, informasi dapat disebarkan dengan cepat dan luas, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi tentang kebijakan publik dan proses demokrasi. Pelatihan ini juga mencakup penggunaan platform digital untuk advokasi dan partisipasi, membantu peserta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan dampak advokasi mereka (Yani et al., 2024). Dengan demikian, teknologi menjadi alat yang kuat untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan transparansi dalam proses demokrasi.

Namun, tantangan disinformasi dan polarisasi opini juga perlu diatasi. Di era digital, informasi yang salah dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi opini publik (Prasetya et al., 2021).

Oleh karena itu, pelatihan ini juga membahas strategi untuk mengatasi disinformasi dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana informasi disebarkan dan dipengaruhi, peserta dapat menjadi advokat yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam proses demokrasi. Dengan partisipasi yang lebih kuat dari masyarakat, diharapkan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih responsif, transparan, dan akuntabel (Ulfyyati et al., 2023). Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam upaya panjang untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, memastikan bahwa suara setiap warga negara didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan publik.

SIMPULAN

Kegiatan "Penguatan Demokrasi Melalui Partisipasi Masyarakat: Pelatihan Advokasi dan Penyusunan Kebijakan Publik" berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam advokasi dan penyusunan kebijakan publik. Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip demokrasi, serta kemampuan praktis dalam menyusun rencana advokasi dan policy brief. Melalui metode yang interaktif dan komprehensif, kegiatan ini juga berhasil membangun jaringan kolaborasi yang kuat di antara peserta, yang berasal dari berbagai kalangan dan wilayah. Keseluruhan, pelatihan ini telah berkontribusi signifikan dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia.

SARAN

Untuk kegiatan pengabdian selanjutnya, disarankan untuk memperpanjang durasi pelatihan agar materi dapat disampaikan dengan lebih mendalam dan praktis. Selain itu, perlu diperbanyak simulasi dan role-playing yang lebih realistis untuk memperkuat keterampilan advokasi peserta. Melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, juga akan memperkaya diskusi dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Akhirnya, peningkatan dukungan teknologi untuk partisipasi daring bisa lebih diperhatikan untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan finansial dan kontribusi terhadap keberhasilan kegiatan pengabdian ini. Dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak telah memungkinkan terselenggaranya pelatihan yang bermanfaat ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias dan memberikan kontribusi berharga selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. Y., Juhad, M., Affandy, Y., Santhi, N. H., & Wijaya, S. A. (2023). Strategi Sosialisasi dan Pelatihan Inovatif untuk Meningkatkan Aktivitas Politik dan Partisipasi Generasi Z dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 1(2), 128–136.
- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 173–194.
- Damanik, N. (2023). PENTINGNYA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK LOKAL. *Literacy Notes*, 1(2).
- Hermanto, B. (2023). DINAMIKA PARTISIPASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN LEGISLASI YANG PARTISIPATORIS. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205–231.
- Hermawan, N. O., & Khikmawanto, K. (2023). Politik dan Pengabdian Masyarakat. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 170–178.
- Maftuchan, A., Ramdlaningrum, H., Aidha, C. N., Djamhari, E. A., Layyinah, A., Herawati, H., Putra, P. T. N., Pertiwi, A. T., & Ningrum, D. R. (2021). *Mengukur Indeks Tata Kelola Civil Society Organizations (CSOs) dalam Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia*.
- Mahardhani, A. J. (2018). *Advokasi Kebijakan Publik*. Calina Media.

- Makhya, S., Mukhlis, M., & Tisnanta, T. (2022). Peningkatan Literasi Kebijakan Publik pada Masyarakat Sipil di Lampung. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 1–9.
- Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 3(2), 91–103.
- Prasetya, B. A., Ati, N. U., & Sekarsari, R. W. (2021). PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN KONTROL PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN TATA RUANG DI KOTA (Studi Kasus Pada Malang Corruption Watch). *Respon Publik*, 15(1), 48–58.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388.
- Sepyah, S., Hardiyatullah, H., Hamroni, H., & Jayadi, N. (2022). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI DESA. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 1–12.
- Sitorus, H. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK: TINJAUAN DARI ASPEK DEMOKRATISASI. *Literacy Notes*, 1(2).
- Sunarto, S., Sulton, S., & Mahardhani, A. J. (2021). Pelatihan Penguatan Partisipasi Politik dalam Mengawal Kebijakan Publik. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 69–74.
- Ulfyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435–444.
- Wathoni, S. (2018). Membangun Masyarakat Partisipatif: Dinamika Partisipasi Perkumpulan Pagar Madani dalam Perumusan Kebijakan Anggaran di Ngawi. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 1(01), 1–21.
- Yani, A., Maryam, M., Fahmi, A., Mauludi, M., Syamsuddin, S., & Aisyah, T. (2024). Pelatihan Penyusunan, Pengawasan Berjenjang dan Advokasi Qanun di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 4(1), 22–25.